

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komunikasi berperan penting dalam menyebarkan informasi atau pesan kesehatan kepada masyarakat. Penyampaian pesan yang efektif dalam kesehatan sangat diperlukan dari para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya. Komunikasi kesehatan merupakan salah satu upaya mempengaruhi kesehatan pada masyarakat secara positif. Komunikasi kesehatan juga salah satu proses untuk menyebarkan pesan kesehatan kepada audiensi dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan keyakinan masyarakat terkait memilih pola hidup yang lebih sehat (Maielayuskha & Ardiyansyah, 2021). Salah satu masalah kesehatan yang perlu penyampaian informasi atau pesan secara efektif dan meluas kepada masyarakat adalah *stunting*. Informasi mengenai *stunting* belum tersebar secara luas dan belum banyak dipahami oleh masyarakat umum. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi ataupun penyuluhan dan juga advokasi terkait *stunting* ke masyarakat, sehingga masyarakat perlu menerima dan juga memahami informasi terkait *stunting*.

Stunting merupakan salah satu prioritas masalah kesehatan di Indonesia yang perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah, para tenaga kesehatan dan juga masyarakat. Penanganan untuk penurunan *stunting* terdapat pada peraturan perundang-undangan peraturan presiden pada nomor 72 tahun 2021 Pasal 1 ayat (4) yaitu Percepatan Penurunan Stunting merupakan upaya yang terdapat intervensi secara spesifik dan juga intervensi sensitif dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, serta berkualitas dengan melakukan kerjasama multisektor dipusat, daerah, dan desa.

Peraturan presiden terkait penanganan *stunting* terdapat 5 pilar untuk keberhasilan dalam penurunan *stunting*, pilar pertama komitmen, pilar kedua pencegahan *stunting*, pilar ketiga bisa melakukan konvergensi, pilar keempat menyediakan pangan yang baik, dan pilar kelima inovasi terobosan serta data yang baik (Rokom.2023.Sehatnegeriku.kemkes, 20 November 2023). Menurut menteri kesehatan Indonesia pada tahun 2018 wilayah Ibu Kota Jakarta mendapat posisi 4 terbawah dengan data *stunting* 22,7% dari total keseluruhan warga DKI Jakarta yang terindikasi *stunting*. Data kasus *stunting* yang masih di atas 14% untuk wilayah DKI Jakarta, telah menunjukkan bahwa adanya permasalahan kesehatan pada masyarakat, sehingga pada tahun 2021 pemerintah Indonesia telah menargetkan agar data kasus *stunting* menurun menjadi 14% pada tahun 2024 (Indriyastuti & Katono, 2022). Untuk mempercepat penurunan *stunting*, pada tahun 2024 menteri keuangan memberikan komitmen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk kesehatan sebesar 187,5 Triliun yang difokuskan untuk penurunan *stunting* (Rokom.2023.Sehatnegeriku.kemkes, 20 November 2023).

Stunting masuk ke dalam *Sustainable Development Goals* (SDGS) pada tujuan pembangunan ke-2 untuk menghilangkan kelaparan dan juga berbagai bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Menetapkan target dengan menurunkan angka kasus *stunting* hingga 40% pada tahun 2025 (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, dalam Haskas 2020). Pada rapat kerja nasional BKKBN, menunjukkan prevelensi *stunting* di Indonesia tahun 2021 sebanyak 24,4% turun menjadi 21,6% di tahun 2022. Penurunan data *stunting* di Indonesia masih belum masuk ke standar WHO yang menetapkan prevelensi *stunting* harus di angka kurang dari 20%

(Rokom.2023.Sehatnegeriku.kemenkes, 20 November 2023). Kementerian kesehatan telah melakukan intervensi secara spesifik dengan 2 cara yaitu intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada anak usia 6 bulan sampai 2 tahun.

Permasalahan *stunting* bukan hanya kurangnya tinggi serta berat badan pada anak, tetapi kurangnya asupan nutrisi yang baik selama masa pertumbuhan anak atau pada 1000 hari pertama pada masa pertumbuhan. Selain itu, kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi yang menjadi salah satu faktor terjadinya *stunting*. Asupan nutrisi serta gizi yang didapat oleh anak sejak lahir tentu akan mempengaruhi pertumbuhan anak terutama pada resiko terkena *stunting*. Adapun beberapa faktor terjadinya *stunting*, tidak terlaksananya inisiasi menyusui dini (IMD), gagal dalam pemberian air susu ibu (ASI), dan juga proses penyapihan dini pada anak (Indriyastuti & Kartono 2022). Perlu nya pemberian asi eksklusif dan juga Makanan Pendamping Asi (MPASI) tentu dapat menghindari anak terindikasi *stunting*.

Anak balita yang terindikasi *stunting* akan mengalami tingkat kecerdasan yang kurang optimal serta lebih sensitif terkena penyakit lain. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penurunan produktivitas pada seusia nya, serta perkembangan motorik anak menjadi lebih lambat, dan anak menjadi kesulitan untuk mengungkapkan bahasa ekspresif. Masalah *stunting* juga berdampak pada penghambatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka kemiskinan dan meluasnya kesenjangan sosial (Indriyastuti & Kartono, 2022). Sehingga peran orang tua dalam pemenuhan gizi pada anak sangat penting agar asupan nutrisi pada anak tercukupi. Ibu yang memiliki pengetahuan yang baik dalam pemenuhan nutrisi, tentu akan mempengaruhi pemenuhan gizi yang baik untuk anak (Olsa dalam Sari et al., 2022).

Dalam menyelesaikan kasus *stunting* yang juga berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, tentu tidak hanya peran pemerintah pusat yang dibutuhkan akan tetapi diperlukan keterlibatan dari berbagai instansi pemerintahan, tenaga kesehatan, dan juga peran masyarakat dalam fasilitas pangan, air bersih, sanitasi, penanggulangan kemiskinan (Kemenkes RI, dalam Maielayuska & Ardiansyah, 2021). Peran masyarakat tentu menjadi subjek untuk menerapkan kebijakan program pemerintah dalam mempercepat penurunan angka *stunting* di Indonesia. Hal tersebut tentu sangat diperlukan pencegahan *stunting* pada sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-59 bulan secara langsung maupun tidak langsung (Harahap & Putra, 2019:145). Sehingga diperlukan advokasi agar penurunan *stunting* ditengah masyarakat bisa teratasi dengan baik dan cepat sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

Advokasi merupakan program kesehatan masyarakat yang pertama kali digunakan oleh WHO pada tahun 1984 untuk salah satu strategi global promosi kesehatan. WHO juga merumuskan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan secara efektif perlu menggunakan 3 strategi pokok yaitu, advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Harahap & Putra, 2019:145). Advokasi juga sebagai upaya pendekatan (*approaches*) kepada orang lain yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang sedang dilaksanakan. Strategi advokasi tentu saja sangat diperlukan karena masalah kesehatan yang belum juga mendapat perhatian secara proporsional dari sektor lain diluar dari kesehatan, baik dari pemerintah maupun swasta (Harahap & Putra, 2019:146).

Advokasi sebagai strategi promosi kesehatan pada percepatan penurunan *stunting* yang tentu saja diperlukan peran dari kalangan pemerintah termasuk presiden, hal tersebut dilakukan karena masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami tentang bahaya *stunting*. Peran pemerintah pusat ataupun lembaga kesehatan lainnya sangat diperlukan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat terkait program penurunan *stunting*. Karena tujuan utama advokasi pada sektor kesehatan adalah untuk mendapat komitmen serta dukungan kebijakan dari para pembuat keputusan di segala tingkat. Pada program kesehatan tentu diperlukan dukungan dari sasaran utama program tersebut yaitu, masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Oleh karena itu, jika program kesehatan telah telah mendapat komitmen serta dukungan kebijakan, maka tahap selanjutnya adalah mensosialisasikan program untuk mendapat dukungan dari masyarakat.

Dalam mensosialisasikan program percepatan penurunan *stunting* kepada masyarakat, petugas dinas kesehatan kabupaten dan juga puskesmas memiliki peranan yang sangat penting, sehingga para petugas memerlukan kemampuan advokasi. Advokasi kesehatan memiliki peranan untuk mempromosikan program kesehatan percepatan penurunan *stunting* kepada masyarakat untuk mencegah dan juga menangani masalah *stunting*. Dengan melakukan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat tentu dapat mempengaruhi perubahan hidup masyarakat yang lebih sehat. Perubahan pola hidup yang lebih sehat akan berpengaruh pada program percepatan penurunan *stunting* dan juga mencegah presentase *stunting* meningkat di wilayah tertentu, hal tersebut bisa saja terjadi jika masyarakat telah memahami dan merubah pola hidup yang lebih sehat.

Implementasi advokasi percepatan penurunan *stunting* dilakukan di Puskesmas setempat sesuai dengan wilayah yang terdapat warga terindikasi *stunting*. Puskesmas merupakan layanan kesehatan masyarakat sebagai wadah sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat terkait program pemerintah pada percepatan penurunan *stunting*. Sehingga kepala puskesmas serta para tenaga kesehatan dipuskesmas dapat memantau terkait perkembangan warga yang terindikasi *stunting* untuk dapat menekan angka penurunan *stunting*. Selain itu, pemberian makanan tambahan (PMT) di posyandu juga dapat membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat terutama pada anak balita yang diberikan sekali dalam satu hari selama 3 bulan. Dengan pemberian makanan tambahan (PMT) yang bertujuan agar meningkatnya status gizi pada balita dan juga kondisi gizi yang baik pada balita sesuai pada umur anak tersebut.

Terdapat satu wilayah di Jakarta Timur yang berhasil meningkatkan kualitas gizi yang baik untuk warga terindikasi *stunting*. Wilayah tersebut yaitu kelurahan Balimester, kecamatan Jatinegara menjadi salah satu wilayah yang masuk ke dalam 5 besar kelurahan terbaik dalam percepatan penurunan *stunting* pada tahun 2023. Wilayah tersebut sebelumnya terdapat 7 anak yang terindikasi *stunting*, data tersebut paling rendah diantara wilayah lain di Jakarta Timur yang terindikasi *stunting*. Faktor ekonomi menjadi hal utama di wilayah Balimester sehingga data anak terindikasi *stunting* sedikit serta mampu mencapai angka *zero stunting*, selain itu monitoring secara rutin kepada ibu hamil untuk menjaga nutrisi anak selama dalam kandungan, adapun kegiatan yang masih rutin dilakukan oleh jajaran Kelurahan Balimester yaitu melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita *suspect stunting*, meskipun wilayah Balimester sudah mencapai angka *zero stunting*, pihak kesehatan Balimester terus melakukan

pengecegan stunting dengan program *one day one egg one milk* setiap hari. Selain itu, kota Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah DKI Jakarta yang memiliki data *stunting* terendah yaitu 13,4%, angka tersebut juga masih lebih rendah dari data *stunting* di DKI Jakarta yaitu 14,8% (Hakim.2023.Antaraneews.com, 20 November 2023).

Melihat fenomena tersebut, penulis menjadikan puskesmas Balimester sebagai lokasi penelitian skripsi dan akan mengkaji secara detail tentang “Advokasi Komunikasi Kesehatan Mengenai *Stunting* di Puskesmas Balimester”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana program advokasi komunikasi kesehatan percepatan penurunan *stunting* di Puskesmas Balimester?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui program advokasi komunikasi kesehatan percepatan penurunan *stunting* di Puskesmas Balimester kepada masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam area kajian komunikasi kesehatan khususnya mengenai advokasi komunikasi kesehatan dalam penanganan *stunting*.

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis

Secara praktis, dapat diharapkan sebagai bahan rujukan bagi puskesmas dalam menerapkan dan menjalankan program penanganan penurunan *stunting* di wilayah masing – masing.